

## ABSTRAK

Di akhir tahun 2019 seluruh dunia termasuk Indonesia dilanda virus yang mewabah yaitu virus corona atau yang dikenal dengan covid-19. Kota Tasikmalaya menjadi salah satu wilayah zona merah yang mengharuskan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan tersebut berdampak kepada perekonomian khususnya para pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan Kyai Haji Zaenal Mustofa. Bahkan para pedagang melakukan aksi protes kepada pemerintah dalam menerapkan kebijakan tersebut. sudah selayaknya pemerintah memberikan solusi tanpa harus mengorbankan ekonomi para pedagang kaki lima. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap pedagang kaki lima di tengah pandemi covid 19.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan publik dan teori analisis kebijakan publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan dan *snowball sampling* yaitu pengumpulan data yang jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara yang mendalam. Teknik analisis data dilakukan secara interaktif (wawancara). Validitas data menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan mengecek suatu informasi yang telah diperoleh.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi dan transformasi kebijakan dari Pemerintah ke masyarakat telah dilaksanakan secara optimal baik dari segi komunikasi yang terstruktur, teratur dan bertanggung jawab, sumberdaya yang didukung dengan fasilitas tempat, kendaraan operasional dan kebutuhan primer, lalu disposisi yang memiliki komitmen, dan struktur birokrasi yang memenuhi kedua variabelnya (SOP dan Fragmentasi). Walaupun dalam prosesnya tidak terlalu signifikan memperhatikan para PKL yang terkenda dampak secara langsung mengalami kesulitan akibat keadaan dan kebijakan yang terjadi. Pemerintah melalui satuan tugas hanya berpedoman pada Wali Kota No 17 Tahun 2020, dan tidak ada sama sekali peraturan dan atensi lebih untuk PKL, semua disama ratakan meskipun dampak yang dirasakan sangat timpang sekali. Hal tersebut menjadi dorongan Pemerintah untuk menjadi lebih peka terhadap pembuatan kebijakan selanjutnya, agar tidak lagi ada sekelompok masyarakat yang merasa tertekan ditengah keadaan pandemi atau keadaan darurat lainnya.

**Kata Kunci : Pandemi Covid 19, Kebijakan, Pedagang Kaki Lima**

## **ABSTRACT**

*At the end of 2019 until now the whole world including Indonesia is being hit by an epidemic virus, namely the corona virus or known as covid 19. Tasikmalaya City is one of the red zone areas that requires large scale social restrictions (PSBB). This policy has an impact on the economy, especially the street vendors who sell along Jalan Kyai Haji Zaenal Mustofa. Even the traders protested against the government in implementing the policy. The government should provide a solution without having to sacrifice the economy of street vendors but also maintain health so that this pandemic ends soon. This study will analyze the effectiveness of the Tasikmalaya City government's policies towards street vendors in the midst of the COVID-19 pandemic.*

*The theory used in this research is public policy and public policy analysis. The research method used in this research is qualitative research method. The sampling technique was carried out by purposive sampling, namely the person who was considered to know the most about what we expected and snowball sampling, namely the collection of data whose numbers were slightly large over time. As for the data collection technique in this study, it is by observing, documenting, and in depth interview. Data analysis techniques were carried out interactively. The validity of the data using source triangulation by checking the information that has been obtained.*

*Based on the results of research and discussion, it is concluded that the implementation and transformation of policies from the Government to the community has been carried out optimally both in terms of structured, regular and responsible communication, resources supported by facilities, operational vehicles and primary needs, then the disposition that has commitment, and a bureaucratic structure that meets both variables (SOP and Fragmentation). Although the process is not very significant, paying attention to the street vendors who are directly affected by experiencing difficulties due to the circumstances and policies that occur. The government through the task force is only guided by Mayor No. 17 of 2020, and there are no regulations or more attention to street vendors at all, everything is leveled even though the impact felt is very unequal. This is an encouragement for the Government to be more sensitive in making future policies, so that there are no longer groups of people who feel stressed in the midst of a pandemic or other emergency situation.*

**Keywords : Covid 19 Pandemic, Policy Strategy, Street Vendors**